



DI KOTA BLITAR

RLPPD

**RINGKASAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA BLITAR
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KOTA BLITAR
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan petunjukNya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Blitar Tahun 2023 sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

RLPPD Kota Blitar Tahun 2023, sebagai salah satu bentuk pelaporan pemerintahan tersebut sebagai perwujudan kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

RLPPD Kota Blitar Tahun 2023 ini berisi laporan kinerja urusan pemerintahan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Blitar secara ringkas untuk disampaikan kepada Masyarakat Kota Blitar, memuat capaian kinerja makro, urusan wajib pelayanan dasar, ringkasan keuangan daerah dan inovasi Kota Blitar selama tahun 2023 yang dibuat dalam rangka memberikan gambaran pelaksanaan dan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Blitar selama Tahun 2023. Secara umum penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di Kota Blitar selama Tahun 2023 berjalan baik, meskipun masih ada beberapa hambatan. Namun dengan kerja sama seluruh stakeholder, hambatan tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

Terima kasih dan penghargaan yang tinggi disampaikan kepada semua pihak atas dukungan dan partisipasinya dalam pembangunan di Kota Blitar. Saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan sebagai bahan perbaikan kinerja dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Blitar pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan RLPPD Kota Blitar ini, semoga dapat memberikan informasi yang komprehensif atas hasil-hasil pelaksanaan kinerja pemerintahan daerah selama Tahun 2023, sebagai bahan evaluasi, pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Blitar kedepan agar semakin baik

Blitar, 22 Maret 2024
WALIKOTA
KOTA BLITAR

Drs. H. SANTOSO, M.Pd

1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2022	CAPAIAN KINERJA 2023	LAJU KINERJA 2023	SA TU AN
1	Indeks Pembangunan Manusia	Laju Indeks Pembangunan Manusia	79.93	80.78	1.063	%
2	Angka Kemiskinan	Laju Angka Kemiskinan	7.37	7.3	-0.95	%
3	Angka Pengangguran	Laju Angka Pengangguran	5.39	5.24	-2.783	%
4	Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5.22	5.29	1.341	%
5	Pendapatan Per-Kapita	Laju Pendapatan Per-Kapita	51.59	55.52	7.618	%
6	Ketimpangan Pendapatan	Laju Ketimpangan Pendapatan	0.371	0.397	7.008	%

Sumber : Kota Blitar dalam angka 2024

2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Capaian
1.a.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	99,307809
1.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,529459
1.a.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	99,359457
1.a.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100
1.b.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	4,3559622
1.b.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100
1.b.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100
1.b.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100
1.b.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100
1.b.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100
1.b.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
1.b.8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100

3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

a. Hasil EPPD Tahun 2023 Atas LPPD Tahun 2022

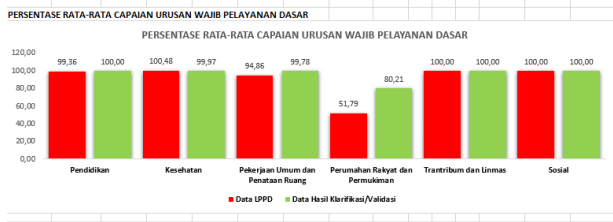
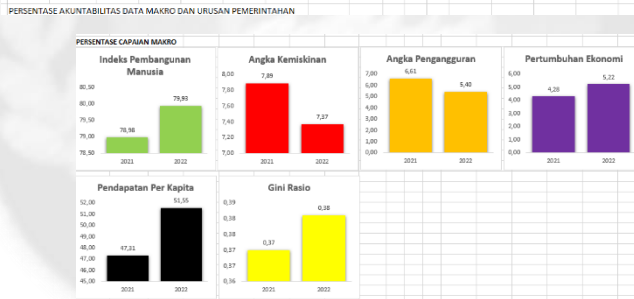
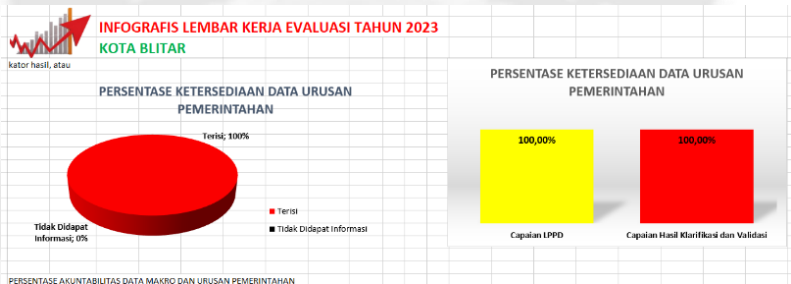
Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Kota Blitar tahun 2022 dilaporkan melalui pelaporan berbasis elektronik pada aplikasi SILPPD, mendapat peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan skor 3,4243 atau dengan kategori prestasi “Tinggi”. adapun capaian LPPD Kota Blitar Tahun 2022 ditampilkan sebagai berikut :

No.	INDEKS	FOKUS	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Capaian Kinerja
A.	INDEKS MAKRO	CAPAIAN MAKRO DAERAH	1	Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2022	1,20
			2	Angka Kemiskinan Tahun 2022	-6,59
			3	Angka Pengangguran Tahun 2022	-18,31
			4	Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022	21,96
			5	Pendapatan Per Kapita Tahun 2022	8,96
			6	Ketimpangan Pendapatan Tahun 2022	2,97
B.	INDEKS MAKRO	PERTUM BUHAN KINERJA MAKRO	1	Laju Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1,20
			2	Laju Penurunan Angka Kemiskinan	6,59
			3	Laju Penurunan Angka Pengangguran	18,31
			4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	21,96
			5	Laju Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita	8,96
			6	Penurunan Tingkat Ketimpangan Pendapatan	-2,97
C.	INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERIN TAHAN	PENDIDI KAN	1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100,00
			1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100,00
			1.a.3		100,00

No.	INDEKS	FOKUS	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Capaian Kinerja
	WAJIB PELAYANAN DASAR	KESEHATAN		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	
			1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100,00
			1.b.1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	4,58
			1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100,00
			1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100,00
			1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100,00
			1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100,00
			1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100,00
			1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00
			1.b.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00
			1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	99,61
			1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00
			1.b.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00
			1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00
			1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100,00
		1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00	
		PEKERJAN UMUM	1.c.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota	100,00

No.	INDEKS	FOKUS	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Capaian Kinerja
		DAN PENATA AN RUANG	1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	100,00
			1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	100,00
			1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	100,00
			1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100,00
			1.c.6	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota	100,00
			1.c.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	97,98
			1.c.8.1	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100,00
			1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100,00
		PERUMA HAN	1.d.1	Hunian untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100,00
			1.d.2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100,00
			1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	98,35
			1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	2,69
			1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100,00
		TRANTIB UMLINMA S	1.e.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100,00
			1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100,00
			1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100,00
			1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100,00

No.	INDEKS	FOKUS	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Capaian Kinerja
		SOSIAL	1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100,00
			1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100,00
			1.e.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	13,13
			1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100,00
			1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100,00



b. OPINI LAPORAN KEUANGAN DALAM 10 (SEPULUH) TERAKHIR DI KOTA BLITAR

Berdasarkan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kota Blitar tahun 2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/Unqualified Opinion) dan berturut-turut selama 13 kali.

Opini Laporan Keuangan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir

NO	TAHUN LAP.KEUANGAN	TANGGAL DAN TAHUN OPINI	OPINI
1	2013	30 April 2024	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2	2014	29 Mei 2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3	2015	31 Mei 2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4	2016	31 Mei 2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5	2017	23 Mei 2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
6	2018	24 Mei 2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
7	2019	30 Juni 2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
8	2020	18 Mei 2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
9	2021	25 April 2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
10	2022	25 Mei 2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 01 Januari 2023 - 31 Desember 2023

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (Kurang)	%
1	PENDAPATAN	910.973.490.403,93	928.728.017.194,01	17.754.526.790,08	101,95
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	168.359.025.901,00	171.583.646.624,26	3.224.620.723,26	101,92
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	48.418.787.698,00	56.381.185.255,00	7.962.397.557,00	116,44
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	8.115.260.641,00	7.823.103.821,23	(292.156.819,77)	96,40
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.042.119.575,00	1.042.119.574,56	(0,44)	100,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	110.782.857.987,00	106.337.237.973,47	(4.445.620.013,53)	95,99
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	168.359.025.901,00	171.583.646.624,26	3.224.620.723,26	101,92
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	733.587.394.531,45	748.139.153.157,22	14.551.758.625,77	101,98
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	589.150.072.818,45	586.871.672.536,22	(2.278.400.282,23)	99,61
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil	95.313.616.625,00	92.510.557.565,00	(2.803.059.060,00)	97,06
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	414.386.984.313,00	417.003.510.313,00	2.616.526.000,00	100,63
1.2.1.3	Dana Alokasi khusus - Fisik	11.081.818.000,00	9.770.554.691,00	(1.311.263.309,00)	88,17
1.2.1.4	Dana Alokasi khusus - Non Fisik	68.367.653.880,45	67.587.049.967,22	(780.603.913,23)	98,86
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	589.150.072.818,45	586.871.672.536,22	(2.278.400.282,23)	99,61
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	53.546.779.000,00	53.546.779.000,00	0,00	100,00
1.2.2.1	Dana Intensif Daerah	53.546.779.000,00	53.546.779.000,00	0,00	100,00

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (Kurang)	%
1.2.2.2	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	53.546.779.000,00	53.546.779.000,00	0,00	100,00
1.2.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	90.890.542.713,00	107.720.701.621,00	16.830.158.908,00	118,52
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil	89.365.629.092,00	106.195.788.000,00	16.830.158.908,00	118,83
1.2.3.2	Bantuan Keuangan	1.524.913.621,00	1.524.913.621,00	0,00	100,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	90.890.542.713,00	107.720.701.621,00	16.830.158.908,00	118,52
	Total Pendapatan Transfer	733.587.394.531,45	748.139.153.157,22	14.551.758.625,77	101,98
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	9.027.069.971,48	9.005.217.412,53	(21.852.558,95)	99,76
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	9.027.069.971,48	9.005.217.412,53	(21.852.558,95)	99,76
	Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	9.027.069.971,48	9.005.217.412,53	(21.852.558,95)	99,76
	JUMLAH PENDAPATAN	910.973.490.403,93	928.728.017.194,01	17.754.526.790,08	101,95
2	BELANJA	1.015.028.533.024,00	958.850.678.230,59	(56.177.854.793,41)	94,47
2.1	BELANJA OPERASI	858.893.275.739,00	819.798.894.789,59	(39.094.380.949,41)	95,45
2.1.1	Belanja Pegawai	328.600.991.307,00	314.865.852.902,00	(13.735.138.405,00)	95,82
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	467.615.800.255,00	443.446.489.987,36	(24.169.310.267,64)	94,83
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	42.000.565.057,00	40.858.897.000,23	(1.141.668.056,77)	97,28

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (Kurang)	%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	20.675.919.120,00	20.627.654.900,00	(48.264.220,00)	99,77
	Jumlah Belanja Operasi	858.893.275.739,00	819.798.894.789,59	(39.094.380.949,41)	95,45
2.2	BELANJA MODAL	141.042.077.285,00	136.638.025.990,00	(4.404.051.295,00)	96,88
2.2.1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	28.533.367.033,00	26.322.308.618,00	(2.211.058.415,00)	92,25
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	64.037.450.196,00	62.954.436.910,00	(1.083.013.286,00)	98,31
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	46.302.333.759,00	45.263.635.846,00	(1.038.697.913,00)	97,76
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.168.926.297,00	2.097.644.616,00	(71.281.681,00)	96,71
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Modal	141.042.077.285,00	136.638.025.990,00	(4.404.051.295,00)	96,88
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.093.180.000,00	2.413.757.451,00	(12.679.422.549,00)	15,99
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	15.093.180.000,00	2.413.757.451,00	(12.679.422.549,00)	15,99
	Jumlah Belanja Tak Terduga	15.093.180.000,00	2.413.757.451,00	(12.679.422.549,00)	15,99
2.4	BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00	
2.4.1	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kpd Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Belanja	1.015.028.533.024,00	958.850.678.230,59	(56.177.854.793,41)	94,47
	Surplus/(Defisit)	(104.055.042.620,07)	(30.122.661.036,58)	73.932.381.583,49	28,95

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (Kurang)	%
3	PEMBIAYAAN	104.055.042.620,07	104.188.959.349,43	133.916.729,36	100,13
3.1	PENERIMAAN DAERAH	129.055.042.620,07	129.188.959.349,43	133.916.729,36	100,10
3.1.1	Penggunaan SILPA	119.055.042.620,07	119.055.042.620,07	0,00	100,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	100,00
3.1.10	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	133.916.729,36	133.916.729,36	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	129.055.042.620,07	129.188.959.349,43	133.916.729,36	100,10
3.2	PENGELUARAN DAERAH	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00	100,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00	100,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00	100,00
	Pembiayaan Netto	104.055.042.620,07	104.188.959.349,43	133.916.729,36	100,13
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	74.066.298.312,85	74.066.298.312,85	0,00

5. INOVASI DAERAH

INOVASI DAERAH TAHUN 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	BENTUK INOVASI	JUDUL INOVASI	MANFAAT
1	2	3	4	6
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sii_Babe (Sistem Informasi dan Inovasi Bappeda Bergerak)	Manfaat dari Aplikasi Inovasi Daerah Kota Blitar adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. memudahkan dalam pengelolaan data inovasi daerah dan proses pelaporan inovasi dari perangkat daerah serta penilaiannya. 2. sebagai bank data inovasi Pemerintah Kota Blitar dari tahun ke tahun.
2.	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	SIMANTAB (Sistem Informasi Tanah dan Bangunan)	Manfaat dari Inovasi ini adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan adanya SIMANTAB ini kegiatan pembukuan dan pengelolaan BMD berupa aset tetap yaitu tanah dapat terakomodasi secara lebih optimal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru. 2. Tersedianya Informasi Tanah dan Bangunan Pemerintah Daerah Kota Blitar dalam bentuk peta yang up to date dan bisa digunakan sebagai instrumen perencanaan wilayah.
3.	Dinas Pendidikan	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PROGRAM SERENADA (Sekolah Yang Religius, Nasionalis Dan Berbudaya)	Manfaat inovasi Program Serenada adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk membentuk karakter seorang peserta didik sehingga peserta didik tersebut menjadi pribadi yang bermoral, bertoleran, tangguh, berakhlak mulia, serta berperilaku baik. 2. Memastikan para murid itu memiliki kepribadian serta karakter yang baik dalam hidupnya. Pendidikan ini bisa/dapat membantu meningkatkan prestasi akademik anak didik. 3. Dapat membentuk individu yang menghargai serta juga menghormati orang lain serta dapat hidup di dalam masyarakat yang majemuk. 4. Sebagai upaya dalam mengatasi akar masalah moral-sosial, seperti ketidakiuruan,

NO	PERANGKAT DAERAH	BENTUK INOVASI	JUDUL INOVASI	MANFAAT
1	2	3	4	6
				ketidaksopanan, kekerasan, etos kerja rendah, dan lain-lain.
4.	Dinas Lingkungan Hidup	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sistem Informasi Pelaporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SIMPONNIK)	Manfaat dari Inovasi ini adalah: 1. Agar pelaporan pengelolaan lingkungannya dilakukan tepat waktu; dan 2. Mengetahui kondisi lingkungan yang ada di Kota Blitar, apakah dalam kondisi baik ataupun buruk.
5.	Bagian Layanan PengadaanBarang/Jasa Sekretariat Daerah	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Aplikasi monev.biltarkota	Tercipta aplikasi monitoring dan evaluasi yang dapat memantau realisasi; pengadaan barang/jasa pada organisasi perangkat daerah
6.	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Aplikasi SILAPBAJA	Aplikasi yang mendukung proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dapat membantu pemerintah untuk optimalisasi pengadaan barang/jasa
7.	Inspektorat Daerah	Inovasi Pelayanan Publik	KLIKWAS (Klinik Pengawasan)	Manfaat dari Inovasi ini adalah: 1. Dapat mengkonsultasikan berbagai masalah seperti potensi penyimpangan, pelanggaran aturan maupun kerugian daerah atas suatu program atau kegiatan. 2. Dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam perencanaan pekerjaan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Meningkatkan kualitas tata kelola yang bebas dari berbagai penyimpangan, manajemen risiko dan pengendaliannya, sarana sosialisasi, koordinasi dan penyamaan persepsi terkait penyelamatan sumber daya daerah serta meningkatkan kinerja dan peran aparat pengawasan di Kota Blitar
8.	Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo	Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi dalam Klinik <i>Medical Check Up</i> (MCU) sebagai upaya peningkatan kualitas dan mutu layanan dengan mengedepankan keselamatan pengguna layanan	Manfaat dari Inovasi ini adalah: 1. Mempermudah pengguna layanan medical check up dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan; 2. Meningkatkan daya saing dalam bidang pelayanan kesehatan serta mampu memanfaatkan

NO	PERANGKAT DAERAH	BENTUK INOVASI	JUDUL INOVASI	MANFAAT
1	2	3	4	6
				sarana dan prasarana yang dimiliki secara optimal
9.	Dinas Kesehatan	Inovasi Pelayanan Publik	PENINGSET CATIN (Pelayanan Terintegrasi Menuju Sehat Calon Pengantin)	<p>Dengan adanya Program Peningset Catin, calon pengantin mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi secara terpadu serta memiliki kesiapan fisik dan mental untuk membina kehidupan pernikahan.</p> <p>Program ini melibatkan Tim Pendamping Keluarga, KUA dan DP3AP2KB sehingga tercapai pelayanan Calon Pengantin terpadu dan terintegrasi.</p>
10.	Dinas Kesehatan	Inovasi Pelayanan Publik	BULAN MERINDU (Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan ANC Terpadu)	<p>Melalui Bulan Merindu, Ibu Hamil dipastikan mendapat pelayanan terpadu selama Pandemi Covid-19 untuk mendeteksi dan memantau kondisi kehamilan secara mandiri. Sumber daya manusia yang terlibat dalam program ini adalah tim bina wilayah Puskesmas khususnya bidan wilayah, tokoh masyarakat, Kader, RT/RW, Dasawisma, PKK, Kelurahan. Pemerintah kota melalui Dinas Kesehatan juga membentuk dokter obgyn wilayah yang berada dibawah POGI Kota Blitar.</p>
11.	Dinas Kesehatan	Inovasi Pelayanan Publik	TEBAR PESONA (Intervensi Keluarga Kolaborasi Keluarga, Kader, Dan Stakeholder Menuju Keluarga Sehat Optimal Masyarakat Sananwetan)	<p>Manfaat dari Inovasi ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bagi UPT Puskesmas Sananwetan : <ol style="list-style-type: none"> Merupakan bentuk kontribusi UPT Puskesmas Sananwetan dalam upaya peningkatan pencapaian target SPM dan indeks keluarga sehat di Kec. Sananwetan (untuk indikator pelayanan Kesehatan penderita hipertensi dan Tuberculosis) Mendorong terwujudnya percepatan penemuan sasaran sesuai indikator SPM dan program Indonesia Sehat di Kec. Sananwetan Bagi Pemerintah Kota Blitar: <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan sinergisitas dan kolaborasi Bersama antara petugas Kesehatan, stake holder terkait, kader dan keluarga dalam pemecahan permasalahan kesehatan;

NO	PERANGKAT DAERAH	BENTUK INOVASI	JUDUL INOVASI	MANFAAT
1	2	3	4	6
				<p>b. Efektivitas dan efisiensi anggaran pemerintah dalam meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat Kec. Sananwetan yang optimal; dan</p> <p>c. Menyusun Rencana Kerja pendekatan keluarga untuk masing-masing indikator standar pelayanan minimal Kesehatan dan indikator keluarga sehat dengan melibatkan lintas sektor tingkat kecamatan diantaranya Kecamatan, kelurahan, KUA, Dinas Kesehatan dan Dinas ketahanan pangan dan pertanian.</p> <p>3. Masyarakat Kota Blitar :</p> <p>a. Mendorong kemandirian keluarga dalam pemecahan masalah Kesehatan di keluarganya; dan</p> <p>b. Menurunkan angka kesakitan dengan peningkatan kualitas hidup sehat bagi masyarakat terutama di wilayah Kec. Sananwetan.</p>
12.	Dinas Kesehatan	Inovasi Pelayanan Publik	GESANG MANTANKU (Gerakan Sumbang dan Pemantauan Kesehatan dengan Kunjungan Rumah)	Dengan peningkatan derajat kemandirian keluarga terhadap kesehatan akan menurunkan angka kesakitan anggota keluarga dan pada akhirnya mampu melakukan tindakan promotif dan role model keluarga di wilayahnya tinggal
13.	Dinas Kesehatan	Inovasi Pelayanan Publik	KAMPUNG BEBAS JENTIK	Manfaat dari Inovasi ini adalah: <p>1. Bagi Masyarakat Pelaksanaan program "KAMPUNG BEBAS JENTIK" diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat dalam mencegah terjadinya kasus penyakit DBD.</p> <p>2. Bagi Puskesmas Dengan menurunnya kasus DBD di Wilayah Kecamatan Kepanjenkidul karena pelaksanaan program</p>

NO	PERANGKAT DAERAH	BENTUK INOVASI	JUDUL INOVASI	MANFAAT
1	2	3	4	6
				"KAMPUNG BEBAS JENTIK", diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengeluaran anggaran untuk kegiatan terutama fogging
14.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Inovasi Pelayanan Publik	Sistem Informasi Fasilitas Olahraga (SIDOPORA)	<p>Manfaat dari Inovasi ini adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manfaat Internal: <ol style="list-style-type: none"> a. Mendorong tumbuhnya inovasi bagi seluruh jajaran staf dan pimpinan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar b. Mendorong pengembangan cakupan dan pemanfaatan dari penerapan kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi 2. Manfaat Eksternal: <ol style="list-style-type: none"> a. Memberi kesempatan masing-masing cabang olah raga untuk mengadakan event-event olahraga di Kota Blitar b. Memberikan ruang lebih luas bagi pengembangan prestasi atlit-atlit olah raga Kota Blitar c. Memudahkan akses masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas olah raga yang ada di Kota Blitar d. Meningkatkan peluang masyarakat untuk mengembangkan Olahraga Rekreasi masyarakat
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Inovasi Pelayanan Publik	LAPIS MANIS (Lacak Peluang Investasi Aman dan Efisien berbasis Web-GIS)	<p>Manfaat dari Inovasi ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan solusi teknologi informasi untuk memperoleh data yang akurat secara sistematis dan aplikatif dalam hal potensi dan peluang investasi berbasis GIS di Kota Blitar. 2. Informasi potensi dan peluang investasi Kota Blitar dapat tersosialisasikan kepada masyarakat luas.

NO	PERANGKAT DAERAH	BENTUK INOVASI	JUDUL INOVASI	MANFAAT
1	2	3	4	6
16.	Dinas Sosial	Inovasi Pelayanan Publik	Ransum Peduli Lansia (RAPELAN)	Terpenuhinya kebutuhan dasar berupa permakanaan sehat bagi lanjut usia terlantar sebagai upaya perlindungan dan jaminan sosial dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan dan/atau nutrisi.
17.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Inovasi Pelayanan Publik	SIDOTI (Sistem Informasi Penyedotan Tinja)	Manfaat dari Inovasi ini adalah terwujudnya Sanitasi yang layak dan aman
18.	Dinas Perhubungan	Inovasi Pelayanan Publik	SIDABUS (Sistem Informasi data Bus Sekolah)	Manfaat dari Inovasi ini adalah: Melalui aplikasi SIDABUS yang dapat diunduh langsung melalui platform Play Store, masyarakat dapat langsung mengunduh dengan mudah khususnya bagi wali murid siswa/i yang memanfaatkan bus sekolah dalam kegiatan sekolah sehari-hari. Orangtua yang memiliki aplikasi ini dapat memantau langsung putra/putrinya yang menaiki bus sekolah. Aplikasi ini sudah terintegrasi dengan alat tapping yang berada pada setiap bus sekolah. Setiap siswa/i yang menaiki bus sekolah melaksanakan tapping kartu yang telah dibagikan di sekolah masing-masing. Data yang telah diterima pada alat tapping ini diintegrasikan ke masing-masing akun siswa di sidabus sehingga data tersebut menjadi sebuah informasi yang dapat diterima dan dipantau oleh orangtua siswa. Informasi data tersebut berupa nama siswa, nomor kendaraan bus sekolah yang dinaiki, serta suhu tubuh siswa tersebut saat melakukan tapping. Selain itu pada aplikasi ini terdapat berbagai informasi mengenai Dinas Perhubungan Kota Blitar serta GPS bus sekolah.
19.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Inovasi Pelayanan Publik	SIGAP Blitar (Sistem Tanggap Aduan Prasarana Permukiman Kota Blitar)	Manfaat dari Inovasi ini adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi potensi luapan saluran drainase permukiman akibat hujan deras sekitar +/- 20% 2. Meminimalkan adanya genangan air hujan kawasan permukiman dan munculnya jentik-jentik nyamuk. 3. Terpeliharanya saluran drainase lingkungan permukiman dengan dilakukan perbaikan & pembersihan sedimentasi sesuai dengan aduan yang masuk

NO	PERANGKAT DAERAH	BENTUK INOVASI	JUDUL INOVASI	MANFAAT
1	2	3	4	6
				4. Terpeliharanya jalan paving lingkungan permukiman dengan dilakukan penggantian paving yang rusak sesuai dengan aduan yang masuk.
20.	Kecamatan Kepanjenkidul	Inovasi Pelayanan Publik	AGEMAN MAS RAHMAT (Aplikasi Gawe Menakne Masyarakat Kelurahan Se Kecamatan)	Manfaat dari Inovasi ini adalah: 1. Segala bentuk kegiatan bisa di upload di Aplikasi Ageman Mas Rahmat 2. Mengurangi waktu pengguna layanan/waktu untuk mengurus layanan lebih efektif
21.	Kecamatan Sukorejo	Inovasi Pelayanan Publik	Aplikasi Sukorejo Kreatif	Selain memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara terpadu manfaat lain dari aplikasi ini adalah sebagai inovasi pelayanan publik Kecamatan Sukorejo agar lebih cepat dan mampu memberikan dampak positif. Selain itu terdapat pula informasi pengajuan santunan kematian sehingga proses pengajuan santunan kematian lebih transparan dan terkendali dengan baik. Selain itu dalam aplikasi ini nantinya menyediakan media promosi yang penting bagi pemasaran produk-produk unggulan dari Kecamatan Sukorejo. Sehingga ekonomi dari masyarakat bisa berkembang. Selain media promosi produk, aplikasi ini nantinya juga dapat mempromosikan event kecamatan dan event kota sehingga sasaran audience event tersebut lebih besar lagi dan sukses lagi.
22.	Kecamatan Sukorejo	Inovasi Pelayanan Publik	TOSERBA Kecamatan Sukorejo	Manfaat dari pendirian Toserba APRAS yang berawal dari Koperasi Konsumen Kecamatan Sukorejo adalah memberikan kemudahan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Toserba ini memang bukan barang baru yang ada di OPD akan tetapi kehadirannya mampu memberikan wadah pemasaran produk potensi masyarakat di Kecamatan Sukorejo. Kecamatan Sukorejo berharap dan senantiasa berbenah agar manfaat ekonomi mampu dirasakan oleh ASN dan masyarakat lebih luas lagi.
23.	Kelurahan Karangtengah	Inovasi Pelayanan Publik	DOKAR NYARIS MENTAL (Pendokumentasian dan Pengarsipan Pernyataan Waris Menggunakan Digital)	Manfaat Inovasi Manfaat Internal Inovasi : 1. Untuk meminimalisir potensi permasalahan hukum yang terjadi akibat dari proses penandatanganan surat pernyataan waris.

NO	PERANGKAT DAERAH	BENTUK INOVASI	JUDUL INOVASI	MANFAAT
1	2	3	4	6
				2. Untuk mengamankan arsip surat pernyataan waris dari kerusakan dan kehilangan karena disimpan di cloud storage Diskominfo Kota Blitar. 3. Sebagai salah satu inovasi dalam pemanfaatan teknologi untuk administrasi pertanahan di Kelurahan Karangtengah. Manfaat Eksternal Inovasi : 1. Sebagai sumber data yang akuntabel bagi Pemerintah Kota Blitar terkait surat pernyataan waris. 2. Terwujudnya informasi data digital terkait surat pernyataan waris di Kota Blitar. 3. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terkait surat pernyataan waris
24.	Kelurahan Rembang	Inovasi Pelayanan Publik	E-Antrian	Manfaat dari Inovasi ini adalah Warga Kelurahan Rembang mendapatkan kemudahan dalam pengurusan surat kependudukan
25.	Kelurahan Karangsari	Inovasi Pelayanan Publik	SISARI (Sistem Informasi Kelurahan Karangsari)	Aplikasi layanan ini telah memberikan dampak yang baik terhadap pemenuhan kebutuhan informasi dan pelayanan kepada masyarakat, di wilayah Kelurahan Karangsari. Permintaan layanan mulai bergeser sedikit demi sedikit meskipun tidak secara signifikan, memberikan atensi dan informasi kepada masyarakat UMKM yang ada di Kelurahan Karangsari mendapatkan peningkatan permintaan karena terfasilitasi secara promosi kepada masyarakat khususnya di wilayah karangsari. Pesanan bisa langsung diarahkan ke kontak pemilik usaha.
26.	Dinas Lingkungan Hidup	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	GEMPITA (Gerakan Masyarakat Peduli Kelola Sampah)	Manfaat dari Inovasi ini adalah: 1. Lingkungan menjadi bersih, asri, indah dan nyaman untuk ditempati. 2. Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. 3. Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pilah pilih sampah yang bernilai ekonomi
27.	Dinas Lingkungan Hidup	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi	QRANA (QR Flora Fauna) Taman Kota Blitar	Manfaat QRANA adalah memudahkan Dinas Lingkungan Hidup selaku pengelola dalam memonitor koleksi hewan dan tanaman di taman.

NO	PERANGKAT DAERAH	BENTUK INOVASI	JUDUL INOVASI	MANFAAT
1	2	3	4	6
		Kewenangan Daerah		
28.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	e-Aptika (Layanan dan Informasi Infrastruktur Aplikasi Informatika	Manfaat dari Inovasi ini adalah Portal/aplikasi yang memudahkan masyarakat dan instansi terkait untuk mendapatkan/memanfaatkan berbagai layanan yang ada di Diskominfo. Mempermudah para pengguna layanan untuk memperoleh respon jawaban dan tindaklanjut atas pertanyaan maupun laporan yang dikirimkan melalui online. Selain itu kinerja dari pengelola layanan dapat tercatat dan terukur, serta diketahui oleh pimpinan secara langsung
29.	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Optimalisasi Penyediaan Data Pelaku Seni Budaya Melalui Aplikasi IBudani (Informasi Budaya dan Seni)	Dalam Membantu dan mendampingi para pelaku seni dan budaya dalam mengurus kartu induk, menyampaikan informasi dan mendokumentasikan kegiatan seni budaya, sehingga kedepannya akan diperoleh data Pelaku Seni dan Budaya sebagai bahan untuk mempermudah pengelolannya
30.	Bagian Umum Sekretariat Daerah	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	SI-BAGUS (Sistem Informasi Bagian Umum Setda)	Manfaat dari Inovasi ini adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon/ Pengguna Dapat melakukan permintaan fasilitas maupun pengiriman surat terkait permintaan fasilitasi secara digital tanpa harus datang ke Sekretariat daerah Kota Blitar. 2. Pemohon/ Pengguna dapat memilih layanan fasilitasi Keprotokolan, peminjaman Gedung, dan permintaan menghadirkan Pimpinan Daerah Secara Digital untuk memperlancar acara atau kegiatan pemohon. 3. Pemohon dapat Megetahui Agenda terdekat Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah, sehingga memudahkan Pemohon menentukan waktu yang tepat dalam menghadirkan Pimpinan Daerah.
31.	Kelurahan Rembang	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Perpustakaan Kelurahan Rembang Kampung Pancasila	Manfaat inovasi bagi Warga Kelurahan Rembang, terwujudnya wadah rujukan dalam berbagai hal melalui buku - buku yang ada di perpustakaan sekaligus wadah bersosialisasi dan berorganisasi
32.	Kelurahan Ngadirejo	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan	i-Ngadirejo	Manfaat dari Inovasi ini adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempercepat waktu penyelesaian pelayanan

NO	PERANGKAT DAERAH	BENTUK INOVASI	JUDUL INOVASI	MANFAAT
1	2	3	4	6
		Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah		<ol style="list-style-type: none"> 2. Memberikan kemudahan pelayanan informasi kepada masyarakat 3. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat (<i>Excellent Service</i>)
33.	Kelurahan Sentul	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	i-Sentul	Manfaat dari Inovasi ini adalah Informasi dapat tersampaikan kepada masyarakat secara langsung, <i>up to date</i> dan akurat.
34.	Kelurahan Karang Sari	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	GERBANG SARI (Gerakan Bank Sampah Karang Sari)	<p>Manfaat yang diperoleh dengan menjadi anggota bank sampah adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi pembuangan sampah di TPA. 2. Meningkatkan kesadaran akan pemilahan sampah. 3. Meningkatkan kesejahteraan warga dengan adanya tambahan penghasilan dari bank sampah